



PERJANJIAN KINERJA APBD PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : UMI ALFIAH, SE

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN,

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DANI ARIJANTI, SE, M.Si

Jabatan : SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 10 November 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

DANI ARIJANTI, SE, M.Si
NIP 197104141996022004

UMI ALFIAH, SE
NIP 197404062006042018

PERJANJIAN KINERJA APBD PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|--|---------------------------------|
| 1 | Terlaksananya Perencanaan Dan Penganggaran Perangkat Daerah. | Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang disusun | 8 dokumen |
| 2 | Tercapainya Indikator Perangkat Daerah. | Persentase capaian indikator perangkat daerah $\geq 90\%$ | 98,36 % |
| 3 | Meningkatnya Pembentukan Dan Pembinaan Kelompok Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga. | Jumlah Kelompok BKB, BKR, dan BKL yang difasilitasi dan dibina | 49 kelompok |
| 4 | Meningkatnya Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga. | Jumlah Sarana BKB dan BKR yang disediakan | 44 unit |
| 5 | Pelaksanaan Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. | Jumlah Keluarga Akseptor KB MBR yang Mengikuti Pembinaan Usaha Ekonomi Keluarga | 15 keluarga |
| 6 | Meningkatnya Usaha Yang Dimiliki Oleh Keluarga Akseptor KB MBR. | Jumlah Keluarga Akseptor KB MBR yang Mempunyai Usaha Peningkatan Ekonomi Keluarga | 6 Keluarga |
| 7 | Meningkatnya Perangkat Daerah Pengarusutamaan Gender. | Jumlah Perangkat Daerah yang memenuhi aspek pengarusutamaan gender | 58 Perangkat Daerah |
| 8 | Meningkatnya Pendampingan Dan Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi. | Jumlah Lembaga/Organisasi Wanita yang dilakukan pendampingan dan advokasi | 32 Lembaga/Organisasi Wanita |
| 9 | Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota. | Jumlah Lembaga/Organisasi Wanita yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan perempuan | 32 Lembaga/Organisasi Wanita |
| 10 | Meningkatnya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender. | Jenis dokumen PPRG yang disusun oleh perangkat daerah | 3 Dokumen |
| 11 | Pelaksanaan Kegiatan Pencapaian Indikator Kota Layak Anak. | Jumlah kelurahan yang mendapatkan pembinaan dalam mencapai Kelurahan Layak Anak | 58 Kelurahan |
| 12 | Meningkatnya Pencapaian Indikator Kelurahan Layak Anak. | Jumlah kelurahan yang mendapatkan pendampingan dalam upaya mewujudkan Kelurahan Layak Anak | 58 Kelurahan |
| 13 | Meningkatnya Penanganan Terhadap Permasalahan Perempuan Dan Anak. | Persentase Penanganan Kasus yang terjadi pada perempuan dan Anak | 100 % |

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|---|-------------|
| 14 | Meningkatnya Lembaga Yang Melindungi Hak Perempuan Dan Anak. | Jumlah lembaga yang responsif terhadap penanganan permasalahan perempuan dan anak | 48.38 % |
| 15 | Meningkatnya Sarana Penunjang KB. | Jumlah sarana dan prasarana KB yang disediakan | 19 Unit |
| 16 | Meningkatnya Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Menggunakan Alat Kontrasepsi. | Persentase PUS yang menggunakan alat kontrasepsi | 83 % |
| 17 | Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji Dan Tunjangan ASN. | Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN | 100 % |
| 18 | Meningkatnya Ketersediaan Barang Dan Jasa Perkantoran. | Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran | 15 Rekening |
| 19 | Meningkatnya Pemeliharaan Dan Pengadaan Sarana Perkantoran. | Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran | 6 Rekening |

Surabaya, 10 November 2023

SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA,

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN,



DANIARIJANTI, SE, M.Si
NIP 197104141996022004



UMIALFIAH, SE
NIP 197404062006042018